



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah  
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>  
**FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 10(2), 187-198

RESEARCH ARTICLE

---

---

## ETNIS TIONGHOA KOTA PADANG: UPAYA PELESTARIAN IDENTITAS ETNIS DALAM ASPEK SOSIAL BUDAYA TAHUN 1966- 2002

**Tiwi Rahma Deci, Yeni Kurniawati Sumantri**

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia*  
*tiwi2597@gmail.com.*

Naskah diterima : 19 September 2021, Naskah direvisi : 11 Oktober 2021 Naskah disetujui : 20 Oktober 2021

**To cite this article:** Deci, T.R., & Sumantri, Y. K. (2021). Etnis tionghoa kota padang: Upaya pelestarian identitas etnis dalam aspek sosial budaya tahun 1966-2002. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 10(2), 187-198. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i2.38984>.

### Abstract

The main problem raised is how was social and cultural life of Chinese ethnic in Padang City from the New Order to the beginning of the reformation. From this problem, three research questions are revealed: 1) How was the socio-cultural life of Chinese ethnic in Padang city since the early period of 1966. 2) What were the efforts made by the Chinese in Padang city to preserve their ethnic identity in socio-cultural aspect during 1967-2002. 3). How is the pattern of cultural interaction between Chinese ethnic and residents in Padang city. The method used to explain these problems is historical methods: source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The research techniques used are literature study and interviews. The findings conclude that the socio-cultural life of Chinese ethnic in Padang city can still be carried out following the traditions and cultures of their ancestors. It is because the community and the city government provided spaces for Chinese ethnic as a form of acculturation so that the similarities between Chinese ethnic and the Minangese people in preserving culture could be implemented based on respective cultures and traditions. In Chinese arts membership, it was found that there was a cooperation between Chinese and Minangese community in Barongsai art and also other arts a form of cultural acculturation.

**Keywords:** Acculturation; Chinese Ethnicity; Discrimination; Government Policy.

### Abstrak

Masalah utama yang diangkat adalah “Bagaimana kehidupan sosial dan kebudayaan etnis Tionghoa kota Padang masa orde baru hingga awal reformasi? Dari permasalahan tersebut terbagi menjadi tiga pertanyaan penelitian: 1). Bagaimana kehidupan sosial-budaya etnis Tionghoa kota Padang pada masa awal tahun 1966. 2) Bagaimana upaya yang dilakukan etnis Tionghoa kota Padang untuk melestarikan identitas etnisnya dalam aspek sosial-budaya tahun 1967-2002. 3). Bagaimana pola interaksi budaya antara etnis Tionghoa dengan penduduk lokal Kota Padang. Metode historis digunakan untuk menjelaskan permasalahan tersebut, yakni: pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Teknik penelitian yang digunakan yakni studi literatur dan wawancara. Hasil temuan menunjukkan kehidupan sosial-budaya etnis Tionghoa mengalami pasang surut sesuai kebijakan yang diterapkan pada masing-masing periode pemerintahan Indonesia. Kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa kota Padang masih dapat dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan kebudayaan leluhurnya, hal tersebut disebabkan masyarakat dan pemerintah kota memberikan ruang bagi etnis tionghoa untuk melestarikan budaya dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan kebudayaan masing-masing. Didalam keanggotaan kesenian Tionghoa kota Padang ditemukan adanya kerjasama yang terjalin antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau di dalam kesenian barongsai dan kesenian lainnya sebagai bentuk akulturasi budaya.

**Kata kunci** :Akulturasi; Diskriminasi; Etnis Tionghoa; Kebijakan Pemerintah.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda serta hidup harmonis sebagai suatu bangsa yang memiliki keunikan baik etnis maupun suku. Salah satu keanekaragaman etnik di Indonesia yang menarik adalah keanekaragaman pada masyarakat Sumatera Barat khususnya kota Padang. Kota Padang merupakan kota besar yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera yang terdiri dari masyarakat Minang serta beberapa etnik di luar Minang yang telah mengalami perkembangan sejak lama seperti masyarakat etnik Jawa, Melayu, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan etnis Tionghoa. Dalam melaksanakan perayaan hari besar Tionghoa, etnis Tionghoa kota Padang dewasa ini melaksanakannya setiap tahun, serta menampilkan berbagai kesenian tradisional tionghoa yang dilaksanakan secara terbuka (Wihardit, 2010, hlm. 96).

Jika kembali pada tahun historis, tahun 1966 menjadi tahun yang sulit bagi kehidupan etnis Tionghoa termasuk di kota Padang, dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang membuat ruang gerak etnis Tionghoa menjadi terbatas seperti dikeluarkannya Instruksi Presiden atau Inpres No. 14 tahun 1967 adanya pelarangan terhadap kebudayaan Tionghoa menyebabkan budaya Tionghoa tidak bisa digelar secara besar-besaran serta disusul dengan dikeluarkannya beberapa peraturan lain bersifat mendiskriminasi etnis Tionghoa yang menghilangkan identitas dan jati diri etnis Tionghoa. Meskipun terdapat pelarangan terhadap kebudayaan Tionghoa, kebudayaan etnis Tionghoa kota Padang masih dapat dilaksanakan meskipun hanya sebatas ruang lingkup etnis Tionghoa dan dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Etnis Tionghoa sudah lama menetap di kota Padang sehingga mengalami proses akulturasi serta adaptasi dengan masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau kota Padang

beberapakali terjadi dan dapat diselesaikan secara damai, Jarang sekali konflik besar terjadi yang melahirkan kerusuhan (Nurchahyo, 2016, hlm. 42).

Dalam proses mempertahankan budaya leluhurnya, etnis Tionghoa bekerjasama dengan membuat sebuah wadah yang bertujuan membantu mengurus keperluan hidup mereka baik dalam bentuk organisasi maupun perhimpunan. Organisasi Tionghoa kota Padang atau kongsi Himpunan Tjinta Teman/Hok Tek Tong (HTT) 1863, serta Himpunan Bersatu Teguh atau/Heng Beng Tong (HBT) 1876, dan serta delapan perkumpulan berdasarkan Marga (suku). Himpunan menjadi simbol kekuatan dan keutuhan budaya bagi etnis Tionghoa di Kota Padang serta menjadi simbol akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minang dalam kerjasama harmonis ditingkat lokal maupun dalam pelestari kebudayaan Tionghoa di kota Padang, memberikan ruang bagi etnis Tionghoa dalam melaksanakan kegiatan sosial-budayanya.

Perkembangan etnis Tionghoa di Kota Padang menjadi suatu topik penelitian yang menarik untuk diteliti, disebabkan tahun 1966 menjadi tahun yang sulit bagi etnis Tionghoa di Indonesia salah satunya di kota Padang, berbagai kebijakan berdampak kepada etnis Tionghoa di kota Padang yang bersifat asimilatif dan diskriminatif mulai diterapkan. Oleh sebab itu peneliti ingin memaparkan bagaimana langkah yang dilakukan oleh etnis Tionghoa kota Padang untuk tetap mempertahankan kebudayaan leluhurnya agar tidak hilang seiring dengan adanya kebijakan tersebut.

Etnis Tionghoa bekerjasama dengan kongsi bergabung saling bekerjasama untuk tetap mempertahankan tradisi Tionghoa agar tidak hilang begitu saja. Peneliti difokuskan mulai dari tahun 1966 hingga tahun 2002. Periodisasi ini dipilih karena terdapatnya dinamika yang dirasakan oleh etnis Tionghoa kota Padang dengan adanya peraturan pembatasan dalam pelaksanaan kebudayaan leluhur hingga ruang gerak etnis Tionghoa menjadi terbuka secara bebas (Febrina, 2015, hlm. 54).

Penelitian mengenai etnis Tionghoa khususnya di Kota Padang berdasarkan penelusuran penulis masih belum banyak ditemukan sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Selain itu, tujuan penelitian ini bagi pendidikan sejarah untuk meningkatkan kesadaran penulis dalam memperkenalkan sejarah lokal khususnya bagi generasi muda mengenai etnis Tionghoa di kota Padang agar generasi muda mengetahui bagaimana sejarah daerah sehingga tidak tercabut dari akarnya serta dengan adanya pemberian pendidikan multibudaya bagi peserta didik disekolah merupakan bentuk pemberian penghargaan, penilaian atas budaya yang beragam serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis Tionghoa kota Padang Oleh karena itu peneliti mencoba untuk mendalami bagaimana kehidupan etnis Tionghoa di kota Padang sehingga dapat beradaptasi dengan baik dengan masyarakat minang.

## **METODE**

Metode merupakan sebuah prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyidikan disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan adalah dengan menggunakan metode sejarah serta teknik yang digunakan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode sejarah menurut Kumalasari (2013) menjelaskan bahwa metode sejarah adalah tahapan atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya serta menjadi instrumen untuk merekonstruksi peristiwa (*history as past actuality*) sejarah menjadi sebuah kisah (*history as written*). Dapat diambil kesimpulan metode historis merupakan teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (internal dan eksternal), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah).

Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah kegiatan dalam mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau mencari materi sejarah atau evidensi sejarah. Pengumpulan sumber penelitian ini meliputi dua cara yakni sumber tulisan dengan membaca serta mempelajari hasil karya ilmiah baik berupa tulisan yang sudah dicetak dalam bentuk buku, artikel jurnal dan beberapa skripsi, ataupun sumber lisan dengan mewawancarai beberapa tokoh etnis Tionghoa kota Padang yang ikut serta dalam melestarikan kebudayaan Tionghoa dari masa orde baru hingga sekarang. Dalam mendapatkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian peneliti, peneliti berkunjung ke perpustakaan seperti: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Batu Api, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padang, Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

Tahapan kedua kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 84) proses kritik eksternal merupakan cara dalam melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal yang dilakukan kepada sumber tertulis, harus memperhatikan bahan yang dipakai seperti kertas, jenis tinta yang digunakan, gaya tulisannya, bahasa, kalimat yang digunakan, kata-kata yang digunakan, gaya huruf dan penampilan luar lainnya. Peneliti melakukan kritik ektern pada sumber-sumber tertulis berupa buku, dimana peneliti tidak terlalu melakukan proses kritik sumber yang terlalu ketat disebabkan karena mempertimbangkan beberapa hal dimana sumber buku maupun jurnal yang peneliti gunakan merupakan hasil cetakan yang didalamnya terdapat nama penulis, tahun terbit, nama penerbit serta tempat sumber buku tersebut diterbitkan. Kritik eksternal terhadap sumber primer berupa dokumen lama berupa foto-foto kepengurusan serta kegiatan pada perkumpulan sosial, kebudayaan dan kematian Himpunan Tjinta Teman (HTT). Proses kritik eksternal yang peneliti lakukan

antara lain dengan melihat kondisi sumber yang masih bisa digunakan melihat kondisi fisik foto sudah berwarna kuning kegelapan, umur sumber, waktu pembuatan sumber, serta orang yang membuat sumber tersebut. Kritik ekstern terhadap dokumen yang didapatkan. Peneliti juga melakukan kritik terhadap sumber lisan dengan memperhatikan faktor usia narasumber, kondisi fisik serta keterhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Selanjutnya kritik internal merupakan bentuk kritik terhadap sumber sejarah yang terfokus kepada aspek “dalam” atau isi dari sumber yaitu kesaksian (Abdurrahman, 2007, hlm. 68-69). Dalam proses kritik internal, peneliti melakukan konfirmasi serta membandingkan berbagai informasi yang didapatkan dari sumber satu dengan sumber lainnya yang membahas permasalahan yang sama. Untuk sumber lisan, adanya perbandingan yang dilakukan dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap serta mendapatkan persamaan dari berbagai bukti yang ada sebagai proses memperkecil kesubjektivitasan dari narasumber. Selain itu, proses perbandingan dilakukan antara sumber tertulis dengan sumber lisan, dimana bertujuan untuk memperbaiki dan membetulkan data serta fakta yang berasal dari sumber primer maupun sekunder yang diperoleh sesuai dengan penelitian.

Selanjutnya tahapan interpretasi sejarah bertujuan untuk mengolah dan menganalisis seluruh informasi serta fakta yang sudah didapat dari sumber-sumber yang telah diperoleh dan sudah dilakukan kritik sumber selanjutnya diperoleh fakta-fakta sejarah untuk ditafsirkan menjadi cerita sejarah yang menggambarkan tentang masa lalu. Untuk memperjelas analisis terhadap permasalahan yang peneliti kaji, maka pada tahapan ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam mengkaji penelitian ini. Pendekatan interdisipliner yang digunakan adalah ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu utama dalam mengkaji permasalahan dibantu oleh

ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial mengenai perubahan sosial, adaptasi masyarakat dan ilmu antropologi. Terakhir tahapan penelitian sejarah adalah historiografi merupakan pola pikir seorang sejarawan dalam penulisan sejarah yang tidak hanya mengunggulkan hal-hal berdasarkan pada penggunaan kutipan maupun catatan-catatan. Tetapi, seorang sejarawan wajib melakukan proses analisis terhadap fakta yang telah didapat dan akan menghasilkan suatu sintesis mengenai fakta yang didapatkan. Penelitian ini berisikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, karena penelitian ini telah melalui beberapa tahapan metode penelitian sejarah seperti, heuristik, kritik sumber baik itu internal maupun eksternal, dan interpretasi (Sjamsuddin, 2012, hlm. 121).

## **PEMBAHASAN**

Pemerintahan Orde Baru memperkenalkan adanya kebijakan asimilasi terhadap Etnis Tionghoa sebagai praktik politik yang tidak pernah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Dimana warga negara keturunan Tionghoa harus berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli, akan tetapi didalam pelaksanaannya seringkali asimilasi bersifat kabur dan bertentangan serta cenderung anti asimilasi karena pertimbangan kondisi politis. Pemerintahan orde baru melarang serta membatasi segala sesuatu yang berbau Tionghoa terutama pada kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat yang tidak boleh dilaksanakan bebas dan dilingkungan umum, sehingga peraturan tersebut menjadi pembeda antara pribumi dan non-pribumi yang cenderung memilah dan bukan mempersatukan etnis Tionghoa dengan orang Indonesia. Dengan alasan masyarakat keturunan Tionghoa dicurigai masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya dan rasa nasionalisme mereka terhadap negara Indonesia diragukan. Sehingga dikeluarkannya kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan, yakni Agama, Sosial dan

budaya, ekonomi, serta politik (Ibrahim, 2013, hlm. 49).

Terdapat beberapa peraturan yang bersifat, membatasi serta menekan kehidupan etnis Tionghoa pada bidang sosial dan kebudayaan antara lain:

- Ketetapan MPRS RI nomor XXVII/MPRS/1966 mengenai agama, pendidikan dan kebudayaan yang melarang kelompok etnis Cina pemeluk agama Tao beribadah di depan umum, serta melarang adanya pendidikan dan huruf yang bercirikan budaya Cina.
- Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 mengenai larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa di Indonesia.
- Surat Edaran No. 06/Preskab/6/1967 yang menyatakan masyarakat Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbaur Indonesia.
- SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan impor, penjualan, dan penggunaan bahasa Cina
- Surat edaran SE.02/SE/Ditjen/PPG/K/1988, yang melarang penerbitan dan pencetakan tulisan, iklan beraksara dan berbahasa Cina di depan umum.
- Peraturan Menteri Perumahan No. 455.2-360/1988, yang melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Kelenteng (Setiono, 2008 hlm. 1008).

Dengan adanya proses asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menangani keanekaragaman etnis di Indonesia diharapkan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing kelompok dapat dihilangkan sehingga menunjang stabilitas nasional maupun persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi dalam prosesnya asimilasi tersebut sulit diterapkan, disebabkan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia tidak sama, akan tetapi multikultural. Dimana didalam masyarakat Indonesia dikenal dengan beragam suku dan budaya serta etnis Tionghoa Indonesia berasal dari berbagai macam suku

seperti *Hakka, Yuphe, Tiochiu, Hokkien, Kantonis, Hainan* dan *Hokchia* (Febrina, Romade, 2015, hlm. 53).

Proses penerapan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia yang terdapat penduduk Tionghoa termasuk di Kota Padang mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat menyebabkan proses kebudayaan Tionghoa dan memiliki keterhubungan yang bersumber dari negara leluhur, dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara intern baik dalam hubungan keluarga maupun perorangan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan maupun adat istiadat Tionghoa tidak dilakukan secara mencolok dilingkungan umum sehingga dibatasi dengan dilaksanakan dikalangan keluarga yang bersangkutan maupun secara sendiri atau pribadi dalam batas lingkungan tempat ibadat yang dilakukan oleh perorangan maupun pada sejumlah orang. Sedangkan pada kebudayaan arak-arakan Tionghoa seperti *Cap Go Meh*, Perayaan Imlek, Tarian Naga, Barongsai tidak dapat dilaksanakan di lingkungan umum. Walaupun pembatasan diberikan kepada etnis Tionghoa dalam berbagai aspek kehidupan, namun proses pelestarian kebudayaan Tionghoa di Kota Padang masih bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasa loyalitas masyarakat Tionghoa di Kota Padang dengan kebudayaan leluhurnya. Dalam pelaksanaannya etnis Tionghoa tidak terlalu banyak mempersiapkan barang-barang perlengkapan untuk menyambut perayaan seperti *Cap Go Me*, perayaan Imlek atau perayaan kebudayaan Tionghoa lainnya. Meskipun adanya pembatasan, etnis Tionghoa tetap melaksanakan kegiatan sembahyang pada hari ke-14 dan sembahyang besar di hari ke-15 yang dilaksanakan pada pagi hari hingga sore, baik itu dilaksanakan di klenteng secara perindividu atau kelompok maupun melaksanakannya dirumah masing-masing yang memiliki altar untuk sembahyang. Kondisi pecinan yang ada di kota Padang saat hari besar Tionghoa dilarang untuk menghiasi rumah dengan lampion maupun pernak

pernik Tionghoa. Rumah pribadi, klenteng, rumah marga serta rumah Perkumpulan etnis Tionghoa tidak diizinkan untuk dihiasi secara mencolok selama adanya perayaan besar Tionghoa. Klenteng maupun Wihara hanya dihias sangat sederhana atau tidak sama sekali. Sehingga kondisi pertokoan pada masa orde baru sepi disebabkan tidak terlalu banyak etnis Tionghoa yang ingin membeli spanduk, maupun pernak pernik dalam menyambut hari hari besar maupun perayaan kebudayaan Tionghoa.

Pembatasan pelaksanaan kebudayaan etnis Tionghoa selama 32 tahun mengakibatkan generasi keturunan etnis Tionghoa kota Padang tidak banyak mengenal mengenai tradisi maupun adat istiadat, dan kebudayaan leluhurnya sehingga pemahaman mengenai kebudayaan Tionghoa perlahan kehilangan identitas kebudayaannya. Dalam mempertahankan identitas Tionghoa merupakan hal berat dan tidak mudah bagi etnis Tionghoa disebabkan etnis Tionghoa lekat dengan berbagai citra kurang menguntungkan dimata masyarakat sekitar maupun dikalangan birokrasi pemerintahan, sehingga menimbulkan kesan segala sesuatu dengan budaya Etnis Tionghoa buruk dan harus dihindari padahal akulturasi budaya dan pembauran sudah lama terjadi jauh sebelum bangsa barat masuk ke Indonesia (Suryaningtyas, 2018, hlm. 237).

Hal menarik ditemukan di kota Padang, dimana walaupun dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, etnis Tionghoa kota Padang masih bisa melaksanakan tradisi dan kebudayaan tradisional leluhur. Hal tersebut sebabkan adanya kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua sejak kecil dan menerapkannya hingga lanjut pada generasi selanjutnya. Kebiasaan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa baik dilakukan dalam ruang lingkup individu, keluarga, maupun perkumpulan sosial kebudayaan dan pemakaman Tionghoa. Akulturasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau kota Padang begitu terasa

beberapa tahun kebelakang. Dimana etnis Tionghoa dan etnis lainnya sudah menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan dikota Padang. Perbedaan pendapat pada masing-masing kelompok dapat diselesaikan dengan cara musyawarah bersama tanpa memperpanjang masalah tersebut. Sehingga tidak terdapatnya pertikaian antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau yang berkepanjangan, serta adanya sikap toleransi kepada perayaan kebudayaan Tionghoa (Salean, wawancara, 1 Juli 2021).

Etnis Tionghoa kota Padang dalam upaya pelestarian kebudayaan dan Tradisi leluhur mendapat dukungan serta peluang yang diberikan oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Padang. Hal ini disebabkan adanya rasa keterbukaan masyarakat lokal disekitar pemukiman etnis Tionghoa kota Padang serta dukungan dari pemerintah yang membuat identitas etnis Tionghoa terjaga dengan baik hingga sekarang walaupun dalam pelaksanaannya hanya sebatas pada lingkungan etnis Tionghoa masing-masing. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang terhadap etnis Tionghoa pada dasarnya tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. disebabkan secara administrasi etnis Tionghoa harus tetap memenuhi ketentuan resmi dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Pemerintah memberikan ijin bagi etnis Tionghoa kota Padang dalam melaksanakan budaya dan adat istiadat mereka disebabkan tidak mungkin memaksakan masyarakat etnis Tionghoa kota Padang menjadi orang Minangkabau, dan sebaliknya, tidak mungkin masyarakat Minangkabau dapat menerima etnis Tionghoa menjadi Minangkabau.

Dalam menjaga identitas kebudayaan Tionghoa di Sumatra Barat khususnya di kota Padang, etnis Tionghoa memiliki berbagai macam perkumpulan sebagai wadah pemersatu etnis Tionghoa yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi dan daerah yang berbeda-beda sehingga perkumpulan menjadi tempat pemersatu etnis Tionghoa di wilayah perantauan. Perkumpulan etnis Tionghoa kota

Padang terdiri dari perkumpulan besar dikenal sebagai kongsi gadang dan perkumpulan kecil dikenal sebagai kongsi kecil. kongsi besar keanggotaannya mencakup berbagai lapis masyarakat etnis Tionghoa dengan marga yang berbeda-beda, sedangkan kongsi kecil hanya mencakup pada persamaan satu marga. Dalam struktur pengurusan terdapat perbedaan didalam kongsi kecil dan kongsi besar. Kongsi kecil tidak menjalankan kegiatan sosial dalam kegiatan pemakaman dan ruang lingkup keanggotaannya hanya mencakupi persamaan marga saja, anggota kongsi kecil mencakup laki-laki dan wanita Tionghoa berpartisipasi didalam perkumpulannya, berbeda dengan kongsi besar dimana fokus kegiatan pemakaman yang menjadi bidang kongsi besar, struktur keanggotaannya hanya laki-laki Tionghoa dan berasal dari seluruh lapisan etnis Tionghoa dari agama yang berbeda-beda, dan pelaksanaan pemakaman dilaksanakan di dalam kongsi besar secara gotong royong. Terdapat dua organisasi besar etnis Tionghoa yang hingga saat ini masih ditemukan dan bertahan di kota Padang yaitu Himpunan Tjinta Teman yang disingkat HTT yang telah berdiri sejak tahun 1863, dan Himpunan Bersatu Teguh atau dikenal sebagai HBT yang telah berdiri sejak tahun 1876. Fungsi organisasi besar Tionghoa ini adalah melayani orang Tionghoa yang menjadi bagian dari anggotanya dan masyarakat Tionghoa kota Padang yang bukan anggotanya dalam konteks sosial, budaya dan pemakaman (Rusli, dkk, 2020, hlm. 166).

Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang secara terang-terangan dilakukan serta pemberian hak istimewa kepada para cukong dalam waktu berkelanjutan menimbulkan amarah dari masyarakat Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997 sehingga kondisi Indonesia semakin memburuk. Penyebab kekecewaan terhadap pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh harga bahan bakar dan pangan yang

meningkat drastis serta adanya peristiwa penembakan mahasiswa yang melakukan aksi demo meluncurkan revolusi. Kerusakan terjadi di beberapa kota di Indonesia. Antara 12 dan 14 Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta dimana etnis Tionghoa dijadikan sebagai sasaran kemarahan massa. Ratusan rumah, bangunan perkantoran serta sarana milik etnis Tionghoa dirampok dan dibakar. Tindakan kekerasan seperti banyak etnis Tionghoa yang dirampok dan dibakar, bahkan banyak orang Tionghoa dilukai, dibunuh atau diperkosa. Tindakan pemerkosaan dan pelecehan, penganiayaan massal serta pembunuhan wanita etnis Tionghoa menyulut kemarahan kelompok wanita dan cendekiawan Indonesia Tionghoa (Dawis, Aimee. 2009, hlm. 34).

Dampak konflik serta kekerasan yang terjadi pada tahun 1998 mengenai krisis ekonomi di berbagai kota besar di Indonesia, tidak terjadi secara besar-besaran di kota Padang. Protes mahasiswa yang dilakukan berfokus kepada sistem pemerintahan Soeharto dan bukan kepada politik etnis dan sebagainya. Kondisi yang terdapat di kota Padang awalnya sedikit menakutkan. Etnis Tionghoa khawatir mengenai keselamatan mereka dengan beredarnya isu-isu serta krisis ekonomi yang diikuti dengan kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta. Bagi masyarakat Minangkabau maupun etnis Tionghoa kota Padang memiliki persamaan pendapat jika permasalahan maupun penyerangan tersebut tidak berguna bagi kedua pihak. Dengan demikian, hal yang menakutkan diganti dengan kerjasama antara masyarakat Minangkabau dan etnis Tionghoa dalam menjaga keamanan kota Padang. Selain itu hal yang menunjang terjadinya kerjasama tersebut juga dilatarbelakangi dari sektor ekonomi. Selain etnis Tionghoa menjadi pesaing terkuat bagi pedagang Minangkabau, pada saat yang bersamaan mereka berperan sebagai mitra dagang. Jika masyarakat Minang menghancurkan bisnis etnis Tionghoa berarti sama juga menghancurkan perekonomian Minang (Alfirdaus, dkk, 2016, hlm. 92).

Dengan terjadinya peristiwa besar tersebut, menyebabkan lengsernya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei tahun 1998. Pemerintah Indonesia selanjutnya digantikan dengan masa pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2000 mengenai pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 mengenai agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian kebebasan kepada etnis Tionghoa serta mendapatkan hak kembali untuk melaksanakan, mengekspresikan agama, kebudayaan tradisi leluhur mereka secara bebas tanpa adanya hambatan atau pelarangan dari pihak manapun. Dengan adanya peraturan mengenai pembebasan bagi etnis Tionghoa dalam melaksanakan adat istiadat dan kebudayaan leluhur pada masa Reformasi, memberikan kesempatan lebih untuk etnis Tionghoa di Indonesia, dimana kebudayaan etnis Tionghoa saat ini dalam pelaksanaan di berbagai tradisi mendapatkan panggung lebih terbuka.

Kondisi Pecinan kota Padang dimeriahkan dengan adanya pemasangan Lampion pada *Klenteng See Hin Kiong*, Wihara serta menghiasi rumah-rumah etnis Tionghoa yang ada di kota Padang. Pemandangan tersebut berbeda ketika masa orde baru yang melarang pemasangan asesoris yang berbau Tionghoa di sekitar Pecinan kota Padang serta pelaksanaan kebudayaan masyarakat etnis Tionghoa kota padang dilaksanakan secara sederhana disebabkan banyaknya rangkaian ritual imlek yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan akses keramaian. Tidak ada pesta kembang api dan kegiatan lainnya karena hal tersebut dilarang oleh pemerintah orde baru. Dengan adanya peraturan tersebut membuat etnis Tionghoa kota padang mengesampingkan ritual-ritual pendukung lain dan fokus pada ritual inti yaitu proses sembahyang sebagai rasa syukur terhadap dewa dan leluhur. Barongsai masih dapat dilaksanakan, hanya saja dilakukan pada ruang lingkup etnis Tionghoa di perkumpulan, kegiatan keagamaan dalam pelaksanaannya

dilaksanakan secara sederhana di kediaman masing-masing dan melaksanakannya secara sederhana. hal tersebut tidak mengurangi kesakralan dari perayaan tersebut. Dalam pelaksanaan imlek yang dirayakan secara sederhana, maka nilai-nilai kekeluargaan dan kesakralan akan semakin kuat. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap semua kegiatan etnis Tionghoa yang bersifat intern didalam keluarga masing-masing (Murtadho, 2020, hlm. 87).

Masa pemerintahan Reformasi memberikan kesan tersendiri bagi etnis Tionghoa Indonesia termasuk di Kota Padang. Dengan adanya peraturan pembebasan dalam melaksanakan kegiatan agama dan kebudayaan leluhur, etnis Tionghoa maupun etnis lainnya diharapkan dapat mengkondisikan kembali situasi yang aman di lingkungan kota Padang dan menghilangkan tindakan deskriminasi. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi etnis Tionghoa kota Padang untuk menampilkan kebudayaan secara luas, bukan hanya dikalangan etnis Tionghoa tetapi juga di lingkungan masyarakat umum sehingga melibatkan etnis Tionghoa secara lebih luas bukan hanya pada ruang lokal, tetapi sampai nasional hingga internasional. Peraturan terhadap etnis Tionghoa dikeluarkan kembali melalui Peraturan dari Presiden Megawati Soekarno Putri mengenai keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2002 mengenai penetapan hari imlek sebagai hari libur Nasional sehingga perayaan kebudayaan Tionghoa semakin meriah dan bisa dinikmati oleh masyarakat umum dan memperkaya destinasi wisata kebudayaan yang beranekaragam di kota Padang. Dalam proses pelaksanaannya, perayaan etnis Tionghoa ini bukan hanya dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa beragama konghucu saja, melainkan adanya partisipasi yang dirayakan oleh etnis Tionghoa beragama Katholik, Budha bahkan Islam. Perayaan kebudayaan Tionghoa selama masa reformasi dapat diselenggarakan secara meriah. Kesenian tionghoa mulai diperkenalkan kembali ke masyarakat Indonesia hingga perayaan kebudayaan

Tionghoa semakin meriah dan sudah banyak diketahui oleh masyarakat umum di masa sekarang.

Pelaksanaan kebudayaan etnis Tionghoa kota Padang seperti perayaan *Cap Go Meh*, perkumpulan HTT dan HBT menampilkan beberapa kebudayaan Tionghoa seperti pengarakan Kio, Perayaan Barongsai, Tarian Naga, Pawai Sipasan, Singa Peking dan kesenian Tionghoa lainnya. Pengunjung yang datang untuk melihat perayaan kebudayaan etnis Tionghoa kota Padang bukan hanya dari kalangan etnis Tionghoa saja, melainkan masyarakat umum kota Padang, wisatawan luar kota Padang bahkan sampai wisatawan asing datang untuk melihat arak-arakan tersebut. Perubahan peraturan yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998 membangkitkan kembali kesenian barongsai dan kebudayaan lainnya. Banyak perkumpulan barongsai kembali bermunculan di kota Padang, dan dimasa sekarang bukan hanya kaum muda Tionghoa yang berpartisipasi memainkan barongsai, tetapi banyak kaum pribumi yang ikut berpartisipasi. Era reformasi memberikan angin segar bagi kegiatan kebudayaan Tionghoa. Satu demi persatu beberapa kelompok mulai muncul dan bangkit kembali tampil dikalangan umum. Pemerintah di setiap tingkatan termasuk memberikan kesamaan perlakuan dan pelayanan terhadap semua warga negara tanpa membedakan satu suku, agama, ras dan antar golongan. Secara langsung maupun tidak memberikan kesempatan bagi kesenian barongsai untuk dapat kembali dihadapan masyarakat tanpa adanya rasa takut. secara nyata masyarakat Tionghoa memulai kembali membentuk dan menghidupkan kesenian mereka seperti barongsai, *Liong*, *Wushu* sesuai dengan perkembangan kesenian masing-masing (Wahyudiarto, 2009, hlm.197).

Seperti pada pelaksanaan barongsai di gedung Heng Beng Tong, kelompok barongsai latihan hampir setiap malam. Setiap tahun pada hari raya Imlek barongsai ditampilkan. Meskipun pada tempat tertutup. Sejak tahun 1998 ketika masa pemerintahan Orde Baru

mundur, barongsai HBT Padang dikirim ke Macau mewakili Indonesia untuk mengikuti Festival Lion Dance sedunia. Dimana pada festival tersebut Barongsai HBT Padang berhasil mendapat peringkat 7 dari 30 group utusan 10 Negara. Pada Juli tahun 2000 barongsai HBT Padang juga dikirim mewakili Indonesia ke Festival Lion Dance di Genting Malaysia dan mendapat juara ke-5.

Pada tanggal 4 Februari 2001 menjadi hari ke sebelas dalam imlek, lorong-lorong jalan di sekitar Klenteng penuh sesak dipenuhi warga Tionghoa. Seluruh kesenian tradisional Tionghoa tampil pada dua kongsi yakni HTT dan HBT. Ada sepasan, tarian naga dan arongsaiyang menampilkan antraksianya. Diiringi musik, tarian Naga, Sepasa dan barongsai bergerak sesuai dengan wujudnya, dimana naga menciptakan garis bergelombang yang bergerak di depan Klenteng bagian kiri. Sepasan bergerak di jalan raya dengan gerak yang menonjol pada bagian kepala, dan barongsai bergerak dengan bentuk permainan bawah mengambil posisi tepat di depan pintu masuk Klenteng. Menjelang mulai pelaksanaan pawai semua seni tradisional tersebut harus melewati pintu masuk Klenteng pertanda mereka ikut sembahyang, minta berkah supaya kegiatan pawai yang akan dilaukan tidak banyak rintangan (Nerosti, 2002, hlm. 79).

Alasan mengapa peraturan pemerintah tidak mencapai pembauran sepenuhnya terhadap etnis Tionghoa adalah disebabkan timbulnya perasaan menantang yang menyebabkan banyak dari etnis Tionghoa menjadi ingin menjaga serta memegang kebudayaannya lebih kuat. Jika etnis Tionghoa tidak memegang kebudayaannya secara kuat hingga sekarang, kebudayaan tersebut secara tidak langsung akan hilang. Meskipun etnis Tionghoa sudah tidak terlalu banyak memahami bahasa ibunya, dalam proses pelaksanaanya tradisi dan kebudayaan leluhurnya masih dapat dilaksanakan serta menyesuaikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta pergantian pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan telah menjadi kebiasaan didalam individu, keluarga

dan kelompok etnis Tionghoa kota Padang serta peraturan pemerintah tidak terlalu dapat mempengaruhi lingkungan pribadi masyarakat etnis Tionghoa. sehingga pembauran tidak masuk pada lingkungan keluarga (Kite, 2004, hlm. 21).

Tradisi kebudayaan etnis Tionghoa kota Padang bukan hanya menjadi bagian identitas bagi etnis Tionghoa saja, melainkan sudah menjadi warna bagi kebudayaan multikultural di kota padang. Perayaan yang diselenggarakan oleh beberapa kelompok etnis di kota Padang memiliki ciri khas masing-masing sehingga lama kelamaan mengalami perkembangan sehingga kebudayaan tersebut menjadi besar dan banyak dikenal oleh masyarakat umum sehingga menjadi identitas yang khas bagi kebudayaan yang ada di kota Padang. Hal tersebut mendorong pemerintah dalam mendukung perayaan kebudayaan berbagai kelompok etnis tersebut termasuk kebudayaan Tionghoa yang secara tidak langsung juga mendorong Peningkatkan pariwisata kota padang. Menurut mantan Wali Kota Padang yang saat ini telah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat bapak H. Mahyeldi Ansharullah, S.P menyebutkan akulturasi budaya Minang dan Tionghoa di Sumatera Barat khususnya kota Padang terjalin sangat baik. Dimana etnis Tionghoa dan etnis lainnya sudah menjadi bagian dari warga Padang. Sehingga akan tetap memberikan tempat bagi seluruh warga tanpa melihat suku dan agama, selagi warga kota Padang akan diberikan pelayanan terbaik. Hubungan yang selama ini terjalin antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Minangkabau di kota Padang berjalan dengan damai dan harmonis. Dimana satu sama lain bekerja sama saling membantu demi kepentingan kota Padang. Dimana sikap keharmonisan tersebut telah lama tejalin yang menghasilkan kebiasaan baru yang beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing (dalam wawancara dengan liputan Padek.com 11 Februari 2021).

Pemerintah berusaha terus berpartisipasi dan mendorong kebudayaan Tionghoa.

Pemerintah berusaha untuk mempertahankan perayaan berbagai kebudayaan agar tidak hilang, dimana kebudayaan tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat kota Padang, hal tersebut sebuah aset yang berharga yang menujung peningkatan perekonomian maupun pariwisata kota Padang. Dalam pelestarian kebudayaan leluhurnya, etnis Tionghoa kota Padang melakukan berbagai unsur pembauran dengan masyarakat Minangkabau yang ada disekitar pecinan kota Padang. Dalam kesenian barongsai, tarian naga, Badminton dan wushu pemain bukan hanya berasal dari etnis Tionghoa, terdapat beberapa pemain yang berasal masyarakat minangkabau. Penyebab utama generasi muda Minangkabau terlibat aktif menjadi anggota barongsai disebabkan kesenian barongsai telah menjadi cabang olahraga yang diperlombakan dari tingkat nasional hingga ke manca negara, hal tersebut menarik generasi muda Minangkabau untuk berpartisipasi menjadi anggota. Selain barongsai menjadi cabang olahraga, alasan lain yang menyebabkan generasi muda Minangkabau masuk kedalam kesenian barongsai disebabkan adanya perbincangan yang terdapat di lingkungan sosial, sehingga menarik perhatian bagi yang berminat di bidang olahraga dan ikut berpartisipasi hingga sekarang. Prestasi barongsai HBT terakhir menjadi juara 2 di Sumatra Barat pada tahun 2016.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan mengenai perkembangan kehidupan sosial dan budaya etnis Tionghoa kota Padang tahun 1966-2002, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan. Pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi segala sesuatu yang bernuansa Tionghoa terutama pada kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat yang tidak boleh dilaksanakan bebas di lingkungan umum, sehingga dalam pelaksanaan kebudayaan masyarakat etnis Tionghoa kota padang masih dapat dilakukan secara sederhana disebabkan

banyaknya rangkaian ritual imlek yang tidak dapat dilakukan karena keterbatasan akses keramaian. Tidak ada pesta kembang api maupun kegiatan lainnya. Dengan adanya peraturan tersebut membuat etnis Tionghoa kota padang mengesampingkan ritual-ritual pendukung lain dan fokus pada ritual utama. Kesenian barongsai masih dapat dilaksanakan, hanya saja dilakukan pada ruang lingkup etnis Tionghoa di perkumpulan dan kegiatan keagamaan dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara sederhana di kediaman masing-masing hal tersebut tidak mengurangi kesakralan dari perayaan tersebut, bahkan nilai-nilai kekeluargaan dan kesakralan semakin kuat. Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap semua kegiatan etnis Tionghoa yang bersifat intern didalam keluarga masing-masing.

Masa pemerintahan Reformasi memberikan kesan tersendiri bagi etnis Tionghoa Indonesia termasuk di Kota Padang. Dimana pada masa Reformasi kebudayaan Tionghoa mulai muncul dan bangkit kembali tampil dikalangan umum dalam menampilkan eksistensinya. etnis Tionghoa dan masyarakat Minangkabau kota Padang bekerjasama untuk saling menjaga kebudayaan tradisi leluhur mereka agar tidak hilang, hal ini disebabkan adanya rasa keterbukaan masyarakat lokal disekitar pemukiman etnis Tionghoa kota Padang serta dukungan dari pemerintah yang membuat identitas etnis Tionghoa terjaga dengan baik hingga sekarang. Secara terbuka pemerintah dan masyarakat kota Padang menerima keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dalam masyarakat kota Padang. Proses asimilasi pada masa orde baru sulit untuk diterapkan, disebabkan etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia tidak sama, akan tetapi bersifat multikultural. walaupun dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, etnis Tionghoa kota Padang masih bisa melaksanakan tradisi dan kebudayaan tradisional leluhur. Disebabkan adanya kebiasaan yang diajarkan sejak kecil dan menerapkannya hingga lanjut

pada generasi selanjutnya. Selain itu peranan perkumpulan besar yakni (HTT dan HBT), dan perkumpulan marga menjadi wadah bagi etnis Tionghoa kota Padang dalam melestarikan kebudayaannya. Selain adanya peranan perkumpulan etnis Tionghoa, hubungan yang terjalin antara etnis Tionghoa kota Padang dengan masyarakat Minangkabau dan pemerintah terjalin dengan baik, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi identitas diri sesuai dengan budaya dan adat istiadat tradisional masing-masing selagi tidak merugikan pihak maupun, kelompok manapun dan sifat masyarakat minangkabau yang terbuka serta demokrasi memberikan ruang tersendiri bagi etnis lain dalam melaksanakan kebudayaan termasuk etnis Tionghoa kota Padang.

Akulturasi kebudayaan antara etnis Tionghoa maupun masyarakat Minangkabau kota Padang dapat dirasakan hingga saat ini, dimana generasi muda Minangkabau banyak berpartisipasi dan bergabung menjadi anggota dalam kesenian tradisional Tionghoa, seperti kesenian barongsai, tarian naga, wu shu dan lain sebagainya. Hal tersebut menggambarkan kota Padang sebagai tempat berkembangnya kebudayaan yang kaya akan perbedaan dan secara bertahap menjadi potensi pariwisata kebudayaan yang multikultural.

## REFERENSI

- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi penelitian sejarah*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Alfirdaus, L, K, dkk. (2016). The position of minang-chinese relationship in the history of inter -ethnic groups relations in padang, west sumatra. *Humaniora*. 28(1), 79-96.
- Dawis, A. (2009). *Orang indonesia tionghoa mencari identitas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Febrina, Romade. (2015). Perayaan cap go me bagi etnis tionghoa di kota padang (1967-2013). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Ibrahim. (2013). Tionghoa indonesia: Dari dikotomi ke mono-identitas. *Jurnal Society*. 1(1). Hlm. 46-55.

- Kite, E. (2004). *Identitas kebudayaan tionghoa: kebijakan soeharto dan keberhasilannya mencapai pembauran lengkap*. ACICIS Studi Lapangan Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Murtadho, H. (2020). Etnis tionghoa tambak bayan surabaya 1966-1998. *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Nerosti. (2002). Pertunjukan barongsai dalam etnis tionghoa di kota padang. *Humanus*. 5(1), hlm. 71-85.
- Nurcahyo, D. A. (2016). Kebijakan orde baru terhadap etnis tionghoa. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Rusli, Hanura & Arios, Rois, L. (2020). Interaksi etnis tionghoa muslim dan non muslim di kota padang provinsi sumatera barat. *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 6(2), 159-171.
- Salean, Johnson. (Anggota Perkumpulan Himpunan Tjinta Teman) wawancara 1 Juli 2021.
- Setiono, B. G. (2008). *Tionghoa dalam pusaran politik*. Jakarta: TransMedia Pustaka.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Ombak: Yogyakarta.
- Suryaningtyas, A. (2018). Eksistensi dan stereotip etnis tionghoa dalam kehidupan sosial-masyarakat. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. 42(3), 235-240.
- Wahyudiarto, D. (2009). Perubahan dan kontinuitas seni barongsai di surakarta pasca reformasi. *Jurnal Penelitian Seni Budaya*. 1(2), hlm. 193-201.
- Wihardit, K. (2010). Pendidikan multikultural: Suatu konsep, pendekatan dan solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 96-105.